

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR/FISIK DI DESA LUSIDUAWUTUN
KECAMATAN NAGAWUTUN KABUPATEN LEMBATA
(STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN DAN AIR BERSIH)**

Laurentius Bisa Lazaren¹, Urbanus Ola Hurek², Eusabius Separera Niron³
giselalazaren@gmail.com¹, urbanusola@gmail.com², eusabius.niron@unwira.ac.id³
Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur desa membutuhkan keterlibatan masyarakat agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan dapat berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya tingkat partisipasi masyarakat sering kali tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih di Desa Lusiduawutun, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata, menganalisis mekanisme komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, serta mengkaji dampak partisipasi tersebut terhadap keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat aktif maupun pasif dalam pembangunan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur bervariasi. Masyarakat yang merasakan manfaat langsung cenderung aktif mengikuti musyawarah desa dan kegiatan pembangunan, sedangkan masyarakat yang memiliki kesibukan kerja dan keterbatasan informasi cenderung kurang terlibat. Mekanisme komunikasi pemerintah desa dilakukan melalui musyawarah desa dan peran tokoh masyarakat, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi meliputi kesadaran masyarakat, kepentingan langsung, kesibukan pekerjaan, serta peran tokoh masyarakat sebagai penggerak. Partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan, menumbuhkan rasa memiliki, dan mendukung keberlanjutan hasil pembangunan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam keberhasilan perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan sosialisasi, memperkuat peran tokoh masyarakat, serta melibatkan warga secara lebih merata dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur Desa, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

Village infrastructure development requires community involvement so that the results of development are in line with needs and are sustainable. However, in practice, the level of community participation is often uneven. This study aims to determine the level of community participation in the planning of road infrastructure development and clean water supply in Lusiduawutun Village, Nagawutun District, Lembata Regency, analyze the communication mechanisms between the village government and the community, identify factors that influence community participation, and assess the impact of such participation on the success and sustainability of development. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with village government officials, community leaders, and residents who were actively or passively involved in development, field observations, and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the level of community

participation in infrastructure development planning varies. Communities that feel the direct benefits tend to actively participate in village deliberations and development activities, while communities that are busy with work and have limited information tend to be less involved. The village government's communication mechanism is carried out through village deliberations and the role of community leaders, but it has not fully reached all residents. Factors that influence participation include community awareness, direct interests, work commitments, and the role of community leaders as motivators. Community participation has a positive impact on the smooth implementation of development, fosters a sense of ownership, and supports the sustainability of development outcomes. The conclusion of this study shows that community participation is an important element in the success of rural infrastructure development planning. Therefore, it is recommended that village governments increase socialization, strengthen the role of community leaders, and involve residents more evenly in every stage of development planning.

Keywords: *Community Participation, Development Planning, Village Infrastructure, Village Development.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah harus mengutamakan partisipasi dalam proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh pemerintah sebagai bentuk kesadaran demokratisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi yang dimaksud secara aspek pemenuhan kebutuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada rakyat. Semua program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat karena masyarakatlah yang dapat mengetahui masalah dan kebutuhan dalam proses pembangunan wilayahnya. Masyarakat jugalah yang akan menentukan apakah pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan di tingkat desa, berhasil atau tidak. Selain itu, sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana program pembangunan, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan efektivitas dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan (Hakim et al 2017).

Menurut Huneryear dan Heoman dalam (Dwiningrum, 2011) menyatakan partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Setiawan & Rhama, 2021).

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV yang berbunyi, pembangunan nasional merupakan suatu tujuan bangsa Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia (Katon Mahendra, 2021). Partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Latif et al., 2019a).

Sebagai salah satu bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat diberdayakan untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Melalui musyawarah desa yang rutin diadakan, masyarakat bersama perangkat desa secara aktif berdiskusi mengenai prioritas

pembangunan yang paling dibutuhkan. Dalam hal ini, pembangunan jalan desa menjadi topik utama karena jalan yang ada sebelumnya sangat rusak dan menyulitkan mobilitas warga, terutama saat musim hujan. Dalam musyawarah tersebut, setiap warga, baik tua maupun muda, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka mengenai desain dan lokasi jalan yang akan dibangun. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi dalam pembangunan desa, di mana suara masyarakat benar-benar dihargai dan dipertimbangkan.

Penerapan prinsip demokrasi dan undang-undang desa tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya di Desa Lusiduawutun yang meliputi pembangunan fasilitas dasar untuk mendukung kehidupan masyarakat. Di bidang pendidikan, terdapat SD Katolik Lewopenutung sebagai sarana pendidikan dasar bagi anak-anak desa. Di bidang kesehatan, tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu) dan balai Posyandu yang berfungsi untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya ibu dan anak. Untuk sektor transportasi, desa ini telah memiliki jalan semenisasi yang menghubungkan antarwilayah di dalam desa, bak penampung untuk menyalurkan air bagi Masyarakat di desa Lusiduawutun serta didukung oleh keberadaan kendaraan dinas berupa sepeda motor untuk menunjang mobilitas pelayanan pemerintahan desa.

Pada tanggal 15 Juli 2024, pemerintah bersama masyarakat melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan semenisasi penghubung desa serta pembersihan bak induk air bersih di Desa Lusiduawutun dalam kegiatan ini, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan infrastruktur, menunjukkan kerja sama yang erat antara pemerintah desa dan warga. Kolaborasi ini telah berlangsung sejak pembangunan jalan dan bak penampungan pada tahun 2019 hingga sekarang, sebagai upaya untuk memastikan infrastruktur tetap terawat dengan baik.



Gambar 1. Perbaikan Jalan Umum di Desa Lusi Duawutun

Sumber Gambar: Pemerintah Desa Lusi Duawutun

Berdasarkan gambar di atas merupakan bukti bahwa adanya partisipasi masyarakat desa Lusiduawutun dalam proses pembangunan jalan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Kegiatan ini merupakan salah satu elemen penting dalam mempercepat proses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Proses pembangunan dimulai dari pengambilan keputusan tentang pembangunan jalan, masyarakat sangat berantusias dan turut serta dalam pengawasan proses pembangunan. Mereka memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati, baik dari segi kualitas material maupun ketepatan waktu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan saling bergotongroyong dalam pembuatan jalan yang dilaksanakan pada tanggal 27 bulan 05 2023 hal ini sangat penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran desa dan mencegah adanya penyimpangan. Pembangunan jalan yang selesai dengan baik tidak hanya meningkatkan aksesibilitas warga, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian antarwarga Desa

Lusiduawutun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam seluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. UU ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui negara. Dalam kerangka ini, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kewajiban warga desa untuk turut aktif dalam musyawarah desa, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, serta pengelolaan dana desa. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga pembangunan desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini difokuskan pada aspek perencanaan pembangunan desa, khususnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) Tahun 2023. Fokus ini dipilih karena keterbatasan data yang tersedia terkait pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, kajian ini tidak membahas implementasi program atau dampaknya secara langsung, melainkan berupaya menganalisis sejauh mana proses perencanaan yang dilakukan telah melibatkan partisipasi masyarakat serta mencerminkan kebutuhan lokal.

Berdasarkan kondisi yang unik di desa Lusiduawutun Ini saya tertarik melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong masyarakat desa Lusiduawutun sangat tinggi partisipasinya dalam pembangunan desa, dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur/Fisik di Desa Lusiduawutun Kecamatan Nagawutun Kabupaten Lembata (Studi Kasus Pembangunan Jalan dan Air Bersih)”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami tentang sesuatu yang secara utuh dengan menggambarkan suatu konteks dengan kata-kata khusus yang ilmiah dan memanfaatkan metode yang alamiah (sugyono,2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dalam Memberikan Gagasan

Partisipasi dalam Memberikan Gagasan adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyampaian ide, pemikiran, pendapat, dan usulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di tingkat desa. Partisipasi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima hasil pembangunan, karena masyarakat ikut berperan dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan.

Menyampaikan Aspirasi

Menyampaikan aspirasi adalah proses penyampaian pendapat, keinginan, kebutuhan, harapan, atau usulan dari masyarakat kepada pemerintah atau pihak yang berwenang di desa Lusiduawutun sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan. Aspirasi disampaikan dengan tujuan agar suara dan kepentingan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Wawancara dengan Bapak Benediktus God sebagai kepala Desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan telah difasilitasi melalui forum musyawarah desa. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan usulan terkait pembangunan desa, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, maupun program pemberdayaan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dihimpun dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Amandus Boleh sebagai Tokoh Masyarakat di desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

bahwa masyarakat cukup aktif menyampaikan aspirasi, terutama terkait kebutuhan mendesak yang dirasakan secara langsung. Aspirasi tersebut umumnya disampaikan dalam musyawarah desa atau melalui perwakilan tokoh masyarakat. Menurutnya, peran tokoh masyarakat penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar ide dan gagasan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

Wawancara dengan Bapak Yohanes M. F Kabelen sebagai Tokoh Pemuda di desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

Tokoh pemuda menjelaskan bahwa kalangan pemuda turut berpartisipasi dalam menyampaikan gagasan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan, olahraga, kebersihan lingkungan, dan pemberdayaan pemuda desa. Aspirasi pemuda biasanya disampaikan melalui forum musyawarah desa maupun pertemuan pemuda, sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam mendukung pembangunan desa.

Wawancara dengan Bapak Yohanes Andreas Lelangona sebagai Masyarakat di desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

Sebagai masyarakat, ia menyampaikan bahwa warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan desa, seperti kondisi jalan, air bersih, dan fasilitas umum. Meskipun tidak semua masyarakat aktif berbicara dalam forum resmi, aspirasi tetap dapat disampaikan melalui tokoh masyarakat atau aparat desa, sehingga suara masyarakat tetap terwakili dalam perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Benediktus God, Tokoh Masyarakat Amandus Boleh, Tokoh Pemuda Yohanes M. F Kabelen, dan masyarakat Andreas Lelangona, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan telah difasilitasi melalui forum musyawarah desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan usulan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta program pemberdayaan masyarakat. Aspirasi masyarakat umumnya disampaikan secara langsung dalam musyawarah desa maupun secara tidak langsung melalui tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di Desa Lusiduawutun tergolong cukup baik. Pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi, namun keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih terdapat warga yang belum aktif menyampaikan pendapat secara langsung dalam forum resmi.

Partisipasi dalam Memberikan Bantuan Kerja Fisik

Partisipasi dalam Memberikan Bantuan Kerja Fisik adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di desa Lusiduawutun melalui sumbangan tenaga dan kemampuan fisik secara langsung untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya. Partisipasi ini mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan.

Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu secara praktis untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu di di desa Lusiduawutun. Kemampuan ini berkaitan langsung dengan penguasaan teknik, prosedur, serta penggunaan alat atau metode kerja yang diperlukan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Wawancara dengan Bapak Benediktus God sebagai kepala Desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

Kepala desa menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam bantuan kerja fisik terlihat melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan kebersihan lingkungan. Bentuk keterlibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan teknis masing-masing warga, sehingga setiap masyarakat dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya.

Wawancara dengan Bapak Amandus Boleh sebagai Tokoh Masyarakat di desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat memiliki semangat gotong royong yang cukup baik. Warga yang memiliki kemampuan teknis, seperti tukang atau pekerja bangunan, berperan aktif dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, sementara masyarakat lainnya membantu melalui tenaga fisik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mendukung pembangunan desa.

Wawancara dengan Bapak Yohanes M. F Kabelen sebagai Tokoh Pemuda di desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

Tokoh pemuda menyampaikan bahwa pemuda desa menjadi salah satu kelompok yang paling aktif dalam kegiatan kerja fisik. Dengan tenaga dan kemampuan teknis yang dimiliki, pemuda sering dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa, seperti pembuatan dan perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta kerja bakti lingkungan. Keterlibatan ini menunjukkan peran strategis pemuda dalam mendukung pembangunan desa.

Wawancara dengan Bapak Yohanes Andreas Lelangona sebagai Masyarakat di desa Lusiduawutun (11/08/2025) yang mengatakan:

Sebagai masyarakat, ia menyatakan bahwa partisipasi dalam kerja fisik merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Ia turut terlibat dalam kegiatan gotong royong sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun kegiatan kebersihan lingkungan. Menurutnya, partisipasi tenaga masyarakat sangat membantu pemerintah desa dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Hasil wawancara dengan seluruh informan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lusiduawutun aktif berpartisipasi dalam bantuan kerja fisik melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, seperti jalan desa, fasilitas umum, dan kegiatan kebersihan lingkungan. Partisipasi tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan teknis masing-masing, di mana warga yang memiliki keahlian khusus berperan dalam pekerjaan teknis, sedangkan masyarakat lainnya membantu melalui tenaga fisik. Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan kerja fisik di Desa Lusiduawutun tergolong baik. Semangat gotong royong masih terjaga, terutama dengan peran aktif pemuda sebagai penggerak utama, meskipun tingkat keterlibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh kesibukan dan kondisi individu masing-masing.

KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan di Desa Lusiduawutun telah difasilitasi oleh pemerintah desa melalui forum musyawarah desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan usulan yang berkaitan dengan pembangunan desa, baik dalam bidang infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, maupun program pemberdayaan masyarakat.
2. Penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung dalam musyawarah desa maupun secara tidak langsung melalui tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Peran tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sangat penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tergolong cukup baik, namun belum merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif menyampaikan pendapat secara langsung dalam forum resmi, yang dipengaruhi oleh kesibukan, rasa kurang percaya diri, maupun kurangnya minat untuk terlibat secara langsung.
4. Partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan kerja fisik di Desa Lusiduawutun tergolong baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa serta kegiatan kebersihan lingkungan.
5. Partisipasi dalam bantuan kerja fisik dilakukan sesuai dengan kemampuan teknis masing-masing warga. Masyarakat yang memiliki keahlian khusus, seperti tukang atau pekerja bangunan, berperan dalam pekerjaan teknis, sementara masyarakat lainnya membantu melalui tenaga fisik.
6. Pemuda desa memiliki peran yang cukup dominan sebagai penggerak utama dalam kegiatan kerja fisik. Keterlibatan aktif pemuda menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Perlu memperluas dan pemeratakan akses informasi pembangunan dengan memanfaatkan berbagai media, baik formal maupun informal (pengumuman di gereja/masjid, pengeras suara, hingga media sosial/WhatsApp).
 - b. Musyawarah desa sebaiknya dijadwalkan pada waktu yang tidak berbenturan dengan kegiatan utama warga (misalnya saat musim tanam/panen).
 - c. Memberdayakan tokoh masyarakat sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Warga diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti musyawarah serta berkontribusi dalam kegiatan pembangunan, mengingat manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri.
 - b. Perlu ditumbuhkan rasa kepemilikan (sense of ownership) agar masyarakat terlibat tidak hanya pada tahap awal, tetapi juga dalam pemeliharaan infrastruktur.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan memperluas fokus pada aspek evaluasi partisipasi dalam pembangunan, termasuk pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.
 - b. Kajian perbandingan dengan desa lain dapat dilakukan untuk memperoleh

gambaran lebih komprehensif tentang pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. and Sentosa, I. (2023). Opportunities and challenges of the south papua railway development project: a transportation infrastructure sustainability perspective. *West Science Business and Management*, 1(04), 280-287. <https://doi.org/10.58812/wsbm.v1i04.214>
- Ardener, S. (2003). *Voice and Participation: Social Dimensions in Participatory Research*. London: Routledge.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandi, R. (2021). Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa kulo.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rgaxc>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Baharuddin, N. (2021). Analisis kebijakan deliberatif terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa carawali kecamatan watang pulu... <https://doi.org/10.31219/osf.io/5rfys>
- Bintarto. (1983). *Geografi Sosial: Dalam Konteks Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Chambers, R. (1995). *Putting the Last First*. London: Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R. (2002). *Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities*. London: Earthscan.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. Cornell University Press.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firman, A. (2021). Pemberdayaan masyarakat di desa berbasis komunitas: review literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram*, 7(1), 132-146. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196>
- Gustavito, W. (2021). Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan kesuksesan radio komunitas. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 5(1), 202-219. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i1.807>
- Hakim, L., Setiawan, R., & Fajarwati, T. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah*. Jakarta: Kencana.
- Haryanto. (2002). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Katon Mahendra. (2021). *Konsep pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam perspektif hukum tata negara*. Jakarta: CV. Pustaka Bangsa.
- Khan, A., Arif, F., & Khan, A. (2025). Environmental and social sustainability assessment of public infrastructure - best practices and lessons learned., 17, 117-125. <https://doi.org/10.4028/p-rsml1c>
- Latif, M., Salim, M., & Mustofa. (2019a). *Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa*. Bandung: Alfabeta.
- Mar'ah, G., Malinda, R., & Pramesta, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di indonesia. *Verfassung Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Masrom, M., Ohueri, C., Azman, A., & Chan, M. (2024). Guidelines for facilitating stakeholders roles in community engagement in green social infrastructure development. *International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology*, 15(1). <https://doi.org/10.30880/ijscet.2024.15.01.001>
- Mikkelsen, B. (2003). *Participatory Methods in Development Research*. London: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

- Sourcebook. 3rd Ed. Thousand Oaks: Sage.
- Mubyarto, D. (1999). *Pembangunan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Oakley, P., & Marsden, D. (1984). *Approaches to Participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Putra, K. and Mursyidah, L. (2023). Perencanaan pembangunan infrastruktur desa kalidawir kecamatan tanggulangin kabupaten sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (Jglp)*, 5(2), 245-253. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958>
- Saragih, B. (1994). *Pembangunan Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Schultz, T. W. (1971). *Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research*. New York: Free Press.
- Sen, A. (2006). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa. *AB*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108>
- Setiawan, R., & Rhama, Y. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah: Teori dan praktik*. Surabaya: Penerbit Cendekia Press.
- Shrestha, O., Forsyth, O., Sihotang, M., Sihotang, M., & Walsham, S. (2022). Assessing the socio-economic impact of infrastructure development on local communities: a mixed-methods approach. *Sosateris*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.35335/3xahcj54>
- Soetomo. (2011). *Pembangunan Masyarakat: Menggali Potensi dan Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: PT Prenada Media Group.
- Soetrisno, L. (1995). *Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Subagyo, A. (2005). *Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, S. (2001). *Partisipasi dalam Pembangunan: Perspektif Demokrasi dan Pemberdayaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutarno. (1994). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia: Perspektif Sosiologis dan Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Unegbu, H., Yawas, D., Dan-asabe, B., & Alabi, A. (2024). Investigation of community engagement in sustainable construction projects: case studies from nigeria. *Journal of Sustainable Construction*, 4(1), 10-36. <https://doi.org/10.26593/josc.v4i1.8109>
- Uphoff, N. T. (1985). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. West Hartford: Kumarian Press.